



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK  
**KECAMATAN SOMPAK**

Jalan Raya Sompak, Sompak, Kode Pos 79361  
Pos-el : sompak@landakkab.go.id

---

KEPUTUSAN CAMAT SOMPAK  
NOMOR : 000.8.3.4 /8/ KEC.SOMPAK

TENTANG  
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
KANTOR KECAMATAN SOMPAK

CAMAT SOMPAK,

- Menimbang : a. bahwadalam rangka mewujudkan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan akuntabel sesuai asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal dan memberikan pelayanan yang berkualitas serta berpedoman pada Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk mekanisme pengelolaan pengaduan perlu disusun dengan mengedepankan asas mudah, responsif, akuntabel, berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Sompak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan-Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1536, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
  16. Peraturan Bupati Landak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 275);
  17. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 680);
  18. Peraturan Bupati Landak Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 788);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSANCAMAT SOMPAK TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN SOMPAK
- KEDUA** : Menunjuk Petugas Pengaduan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada Kantor Kecamatan Sompak
- KETIGA** : Petugas Pengaduan Pada Kantor Kecamatan Sompak mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan Masyarakat atas ketidakpuasan pelayanan Administrasi yang

diberikan pada Kantor Kecamatan Sompak;

- b. Memverifikasi pengaduan publik atas pelayanan yang diterima pada ruang lingkup tugas masing-masing seksi pada Kantor Kecamatan Sompak;
- c. menerapkan standar operasional pelayanan pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik; dan
- e. melaporkan tugas dan kemajuan terkait layanan pengaduan kepada pimpinan secara periodik.

**KEEMPAT** : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran surat Keputusan Camat Sompak ini sebagai Petugas Pengaduan Pada Kantor Kecamatan Sompak.

**KELIMA** : Keputusan Camat Sompak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sompak  
pada tanggal : 5 September 2024

Plt. Camat Sompak,



Weli Brodus, A, SH

Perata / III. c

NIP. 19781218 201407 1 001

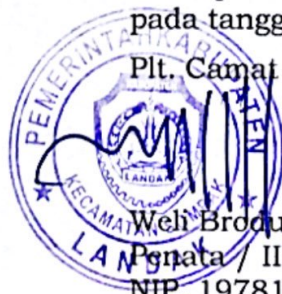
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT SOMPAK  
NOMOR : 000.8.3.4 / 8 / KEC.SOMPAK  
TENTANG  
PETUGAS PENGADUAN PADA KANTOR KECAMATAN SOMPAK

PETUGAS PENGADUAN PADA  
KANTOR KECAMATAN SOMPAK

1. Nama : Lepinus Ripin, SP  
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Nama : Christo Porus Bouten, S.I.P  
Jabatan : Pelaksana Pada Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Nama : Diana  
Jabatan : Pelaksana Pada Sekretariat
4. Nama : H.Thomas.G  
Jabatan : Pelaksana Pada Sekretariat

Ditetapkan di : Sompak  
pada tanggal : 11 September 2024

Plt. Camat Sompak,



Weli Brodus. A, SH

Pegawai / III. c

NIP. 19781218 201407 1 001